



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/21/M.AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah

7 Maret 2022

**YTH. BAPAK KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DI  
JAKARTA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh nilai **60,08** atau predikat "**B**". **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun masih memerlukan beberapa perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,20
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,72
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,94
d.	Evaluasi Internal	10	5,89
e.	Capaian Kinerja	20	6,33
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,08</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan merupakan evaluasi pertama yang dilakukan atas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut:
  - a. Tujuan dan sasaran strategis yang termuat pada dokumen perencanaan pusat dan unit kerja belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan dampak dari program dan kegiatan yang ditetapkan belum dirasakan oleh masyarakat;
  - b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar unit kerja yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja;
  - c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada unit kerja sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan unit kerja dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
  - d. Pimpinan unit kerja belum terlibat aktif dalam proses pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
  - e. Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pencapaiannya belum dirumuskan dengan baik sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam pengungkapan informasi pada laporan kinerja;
  - f. Hasil evaluasi internal AKIP yang telah dilakukan terhadap unit kerja belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan; dan
  - g. Pelaksanaan implementasi SAKIP belum mampu secara nyata memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja;
2. Memastikan keselarasan antara sasaran strategis dan program/ kegiatan di bawahnya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja. Hal tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengukuran efisiensi yang didasarkan pada perbaikan manajemen kinerja. Melakukan penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaiannya dengan PermenPAN-RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
3. Mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam proses penetapan kinerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan pegawai pada setiap level organisasi;
4. Meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh termasuk dalam pemberian *reward and punishment* dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih maksimal;
5. Memastikan kualitas pengungkapan informasi termasuk di dalamnya kecukupan analisis serta pengungkapan faktor pendukung dan penghambat dan strategi pencapaian dalam laporan kinerja;
6. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja unit kerja. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk memastikan tindak lanjut seluruh hasil rekomendasi evaluasi; dan
7. Memastikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
TJAHJO KUMOLO**